MJPA : Musamus Journal of Public Administration
Volume 9. No. 1. (Oktober, 2026), hlm 38-51
eISSN/pISSN:2622917X/26226499

Analisis *Logic Model* Pada Pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon Oleh Pemerintah Desa Cipayung

Afrazra Izha Prayoga Aridi[1], Gun Gun Gumilar[2], Mochamad Faizal Rizki[3]

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ; 2210631180117@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Cipayung dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon melalui pendekatan *Logic Model*, dengan fokus pada tahapan input, output, dan outcome. Meskipun Pemerintah Desa Cipayung telah berperan aktif mendampingi Pokdarwis hingga berhasil menetapkan Kampung Ciranggon sebagai desa wisata pertama di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025, namun pada praktiknya kebijakan operasional belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan regulasi lokal belum memuat ketentuan teknis operasional yang memadai, ketiadaan pelatihan formal, belum tersedianya transportasi umum formal, serta fungsi BUMDes yang belum berjalan akibat pola pengembangan yang masih bertumpu pada inisiatif swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis paradigma konstruktivisme. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan artefak. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik penataan pola hubungan kausalitas *Logic Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap input, pemerintah desa telah memobilisasi regulasi lokal, memanfaatkan keunggulan geografisnya, dan puncak capaian input ada pada peraihan status formal. Pada tahap output, kolaborasi berhasil membentuk struktur Pokdarwis Bojong Rangkas, fasilitasi infrastruktur fisik, dan atraksi wisata. Pada tahap outcome, keberadaan desa wisata memberikan dampak ekonomi positif berupa terbukanya lapangan kerja warga asli, peningkatan pendapatan UMKM, serta dampak sosial berupa penurunan angka kriminalitas dan meningkatnya kesadaran lingkungan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas tata kelola pemerintah desa dalam menerbitkan aturan teknis operasional, mengaktifkan kelembagaan BUMDes, serta menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan terstruktur demi menjaga keberlanjutan ekosistem desa wisata.

Kata kunci : *Desa Wisata, Logic Model, Peran Pemerintah, Pariwisata, Pokdarwis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Cipayung Village Government in the development of the Ciranggon Village Tourism Village through a Logic Model approach, focusing on the input, output, and outcome stages. Although the Cipayung Village Government has played an active role in assisting the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) until it successfully established Ciranggon Village as the first tourism village in Bekasi Regency in 2025, in practice, operational policies have not been implemented optimally. This is because local regulations do not contain adequate technical operational provisions, the absence of formal training, the unavailability of formal public transportation, and the function of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) that has not been running due to the development pattern that still relies on community self-help initiatives. This study uses a qualitative method with a case study approach based on the constructivism paradigm. Data sources were obtained through observation, interviews, documentation, and artifacts. Data analysis was carried out using the Logic Model causal relationship pattern structuring technique. The results show that at the input stage, the village government has mobilized local regulations, utilized its geographical advantages, and the peak of input achievement is in achieving formal status. At the output stage, the collaboration succeeded in forming the structure of the Bojong Rangkas Pokdarwis, facilitating physical infrastructure, and tourist attractions. At the outcome stage, the existence of tourist villages has a positive economic impact in the form of job opportunities for local residents, increased income

for MSMEs, and social impacts in the form of reduced crime rates and increased environmental awareness. This research implies the importance of strengthening the governance capacity of village governments in issuing technical operational regulations, activating village-owned enterprise (BUMDes) institutions, and conducting structured tourism training to maintain the sustainability of tourist village ecosystems.
Keywords : *Tourism Village, Logic Model, Role of Government, Tourism, Pokdarwis*

Pendahuluan/ Introduction

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Cindy, 2025). Dalam dua dekade terakhir, pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas semakin mendapat perhatian lintas disiplin, terutama karena kemampuannya dalam menjembatani kepentingan konservasi lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Rais, 2023). Berbeda dengan model pariwisata massal yang cenderung menggerus identitas lokal, pariwisata berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif mengelola potensi alam dan budaya di wilayahnya sendiri (Azhar, 2025). Relevansi pendekatan ini semakin menguat di wilayah perdesaan yang memiliki keunggulan sumber daya alam namun belum memiliki akses terhadap industri formal, sehingga desa wisata menjadi instrumen alternatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi lokal yang inklusif dan ramah lingkungan(Prathama, 2024).

Di tingkat nasional, pengembangan desa wisata mendapatkan landasan kebijakan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan pariwisata sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan (Raditya et al., 2024). Amanat tersebut kemudian diturunkan melalui program-program pemberdayaan desa wisata yang melibatkan peran pemerintah daerah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal sebagai aktor utama pengelolaan (Saleh et al., 2025). Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang posisi yang sangat strategis bukan hanya sebagai penyedia regulasi dan legitimasi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator pengembangan wisata di tingkat tapak (Yulianti, 2021). Keberhasilan peran tersebut tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya program, melainkan perlu ditelusuri secara sistematis melalui kerangka analisis yang mampu membuktikan kaitan antara sumber daya yang dimobilisasi, capaian program, dan dampak nyata bagi masyarakat (Paramitha et al., 2020).

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Xu et al., 2023). Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenparekraf menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional mengalami fluktuasi signifikan akibat pandemi COVID-19: sempat mencapai 4,97% pada 2019, anjlok ke titik terendah 2,30% pada 2021, lalu berangsur pulih menjadi 3,60% pada 2022 dan 3,90% pada 2023 (BPS, 2025) (Putri, 2025).

Tabel 1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDB Nasional Tahun 2019–2023

Tahun	Kontribusi Terhadap PDB
2019	4,97%
2020	3,97%
2021	2,30%
2022	3,60%
2023	3,90%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Tren pemulihan ini menegaskan relevansi pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas di tingkat desa sebagai strategi pemulihan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Dewi, 2021). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa pariwisata bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan (Raditya, 2024). Mandat nasional ini kemudian diterjemahkan di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata yang menjadi dasar hukum pengembangan Kampung Ciranggon (Puziah, 2021).

Desa Wisata Kampung Ciranggon yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi merupakan contoh nyata transformasi dari kegiatan konservasi lingkungan swadaya menjadi destinasi *back to nature* di tengah kawasan industri (Puziah, 2021). Inisiatif penghijauan yang dipimpin oleh Gunawan (akrab disapa Mbah Goen) bersama masyarakat sejak 2018 memanfaatkan hutan jati, sungai, dan lahan pertanian perlahan mendapat dukungan institusional dan akhirnya diresmikan sebagai objek wisata pada 2019, sebelum pada 19 Desember 2025 ditetapkan sebagai desa wisata pertama di Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati Bekasi (Muafi et al., 2020).

Dalam perjalanannya, Pemerintah Desa Cipayung memiliki peran strategis sebagai motivator yang menggerakkan regulasi dan sumber daya lokal, fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan atraksi wisata, sekaligus dinamisator yang mendorong dampak sosial-ekonomi nyata bagi masyarakat Kampung Ciranggon (Pitana & Gayatri, 2005). Ketiga peran ini tidak berjalan secara linier dan sederhana, melainkan melibatkan serangkaian keputusan kebijakan, mobilisasi aktor lokal, serta proses adaptasi kelembagaan yang kompleks di tengah dinamika kawasan industri Cikarang yang mendominasi Kabupaten Bekasi (Aw, 2019).

Meskipun demikian, kajian sistematis yang mampu memverifikasi rantai kausal antara sumber daya yang dimobilisasi, capaian program, dan dampak nyata bagi masyarakat di level pemerintahan desa masih sangat terbatas dalam literatur ilmu pemerintahan di Indonesia (Putri et al., 2025). Sebagian besar penelitian tentang desa wisata lebih banyak berfokus pada strategi pengembangan atau partisipasi masyarakat, namun belum menelusuri secara mendalam bagaimana *input* pemerintah desa benar-benar menghasilkan *output* yang terukur dan berlanjut pada *outcome* yang dirasakan komunitas lokal (Parta et al., 2025). Celah

inilah yang mendorong penelitian ini untuk menerapkan *Logic Model* (Yin, 2014) tipe ketiga berbasis program dan kebijakan sebagai kerangka analisis, karena pendekatan ini secara eksplisit menghubungkan setiap elemen program dalam satu rantai kausal yang dapat diverifikasi secara empiris (Pandu Logika, 2022). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana peran Pemerintah Desa Cipayung dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon dilihat dari dimensi *input, output*, dan *outcome*?

.

Metode/Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dikembangkan oleh (Yin, 2014) dan (Creswell, 2018). Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme, yang memandang realitas sosial dibangun melalui interaksi dan pemaknaan para aktor (Mulyani et al., 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik: (1) observasi lapangan di kawasan Kampung Ciranggon, (2) wawancara mendalam (*in-depth interview*), (3) studi dokumentasi, dan (4) penelaahan artefak fisik. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan lima partisipan kunci:

Tabel 2. Informan Kunci

Kode	Identitas Informan	Tanggal Wawancara
A1	Sekretaris Desa Cipayung	18 Februari 2026
A2	Ketua Pokdarwis Bojong Rangkas	25 Februari 2026
A3	Ketua Dusun RT 02/01 Kp. Ciranggon	7 Maret 2026
A4	Pelaku UMKM Kawasan Wisata	4 April 2026
A5	Warga Kampung Ciranggon	7 Maret 2026

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Teknik analisis menggunakan *Logic Model* Yin (2014) tipe ketiga berbasis program dan kebijakan yang secara operasional dibagi ke dalam tiga tahapan: *input* (sumber daya yang dimobilisasi), *output* (hasil langsung yang dapat diamati), dan *outcome* (dampak jangka menengah bagi masyarakat). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data (konvergensi empat sumber bukti) dan member check (Bryman & Bell, 2015). Sebelum memaparkan temuan per komponen, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana dioperasionalkan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. *Logic Model* merupakan teknik analisis dalam penelitian studi kasus yang secara sengaja membentuk rangkaian hubungan sebab-akibat yang kompleks antara peristiwa-peristiwa selama periode tertentu, sehingga peneliti tidak hanya melihat hasil akhir program, tetapi juga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa hasil tersebut terjadi.

Penelitian ini menggunakan tipe ketiga menurut Yin, yaitu *program and policy logic model*, karena fokus penelitian diarahkan pada peran Pemerintah Desa Cipayung sebagai aktor pelaksana program pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon. Relevansi penggunaan alat analisis ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan proses pengembangan desa wisata ke dalam alur yang sistematis, terukur, dan dapat diverifikasi secara empiris melalui tiga komponen utama, yaitu *input*, *output*, dan *outcome*.

Tabel 3. Alur Analisis *Logic Model*

No	Tahap Analisis	Fokus Kerja Analisis	Penerapan dalam Penelitian
1	Pemetaan rantai kausal	Menempatkan seluruh data mentah ke dalam posisi yang tepat dalam rantai kausal, apakah sebagai *input*, *output*, atau *outcome*	Data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan artefak dipilah ke dalam tiga komponen *input*, *output*, dan *outcome*
2	Verifikasi bukti empiris per komponen	Memastikan setiap elemen rantai kausal didukung oleh lebih dari satu sumber bukti melalui prinsip *triangulation of evidence*	Setiap elemen diverifikasi dengan mencocokkan temuan wawancara, observasi, dokumentasi, dan artefak secara bersamaan
3	Penyajian pola hubungan kausal	Menyajikan hasil verifikasi dalam bentuk *Logic Model Matching* untuk melihat apakah proposisi terkonfirmasi, dimodifikasi, atau ditolak	Tabel *Logic Model Matching* digunakan sebagai peta analitik awal sebelum pembahasan naratif
4	Analisis *Input*	Mengidentifikasi sumber daya awal yang dimobilisasi seperti regulasi, SDM, SDA, dan dukungan kelembagaan	Peneliti menganalisis peran Pemerintah Desa Cipayung dalam menggerakkan regulasi, potensi alam, SDM lokal, dan dukungan kebijakan
5	Analisis *Output*	Mengidentifikasi hasil langsung dari program yang dapat diamati dan diverifikasi	Peneliti menganalisis capaian langsung berupa kelembagaan Pokdarwis, atraksi wisata, dan infrastruktur pendukung

No	Tahap Analisis	Fokus Kerja Analisis	Penerapan dalam Penelitian
6	Analisis *Outcome*	Mengukur perubahan yang dihasilkan dari *output* program terhadap masyarakat	Peneliti mengukur dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan UMKM dan dampak sosial berupa penurunan kriminalitas serta meningkatnya kesadaran lingkungan
7	Penarikan kesimpulan	Mengonfirmasi apakah rantai kausal *input, output, outcome* berjalan konsisten dan terbukti empiris	Kesimpulan ditarik bertahap dari *input*, *output*, dan *outcome* sebelum disimpulkan secara menyeluruh

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

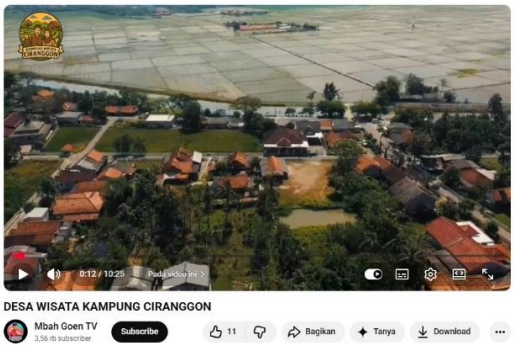
Berdasarkan tujuh tahap alur analisis yang telah dipaparkan pada Tabel 3, proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan artefak. Setiap elemen dalam rantai kausal kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga pola, yaitu terkonfirmasi apabila bukti empiris konsisten dengan proposisi, dimodifikasi apabila proposisi terbukti sebagian dan memerlukan penyesuaian konteks, atau ditolak apabila bukti empiris tidak mendukung proposisi (Yin, 2014). Hasil dari proses klasifikasi ini disajikan dalam bentuk *Logic Model* Matching pada Tabel 7 di bagian Hasil dan Pembahasan, yang berfungsi sebagai peta analitik menyeluruh sebelum temuan diuraikan secara naratif per komponen..

Hasil dan Pembahasan/ Result and Discussion

1. Input Pada Peran Pemerintah Desa Cipayung sebagai Motivator

Komponen input mencakup keseluruhan sumber daya yang dimobilisasi Pemerintah Desa Cipayung dalam menginisiasi pengembangan desa wisata. Regulasi berupa Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata menjadi fondasi hukum, namun belum memuat ketentuan teknis operasional pengelolaan wisata secara memadai pola dimodifikasi. Sumber daya alam Kampung Ciranggon meliputi kawasan hutan jati, bantaran Sungai Cibeet, hamparan sawah, dan irigasi alami terkonfirmasi sebagai modal dasar back to nature yang dikembangkan secara swadaya sejak 2018 (Somad, 2025).

Gambar 1. Kondisi Geografis Desa Wisata Kampung Ciranggon



Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Terletak di ujung paling timur Kabupaten Bekasi dan diapit persawahan serta Sungai Cibeet, kondisi geografis yang khas ini menjadi daya tarik alam autentik yang semakin langka di tengah dominasi kawasan industri Cikarang. Keunggulan geografis ini selaras dengan Pasal 7 huruf a Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 yang mendefinisikan daya tarik alam sebagai salah satu kriteria utama penetapan desa wisata (Riadhussyah et al., 2021).

Sumber daya manusia menunjukkan arahan Kepala Desa yang aktif, namun pelatihan teknis kepariwisataan formal belum pernah dilaksanakan. Pokdarwis Bojong Rangkas terbentuk dengan 28 SDM lokal aktif yang tersebar di lima unit atraksi wisata (Tabel 1). Puncak capaian input adalah diraihnya penetapan status formal Kampung Ciranggon sebagai desa wisata pertama Kabupaten Bekasi melalui SK Bupati Bekasi pada 19 Desember 2025, serta terdaftarnya di portal Jadesta Kemenparekraf dengan ID Desa Wisata 19082.

Tabel 4. Sebaran SDM

No	Unit Atraksi Wisata	Jumlah SDM	Keterangan
1	Kuliner Maranggi Mbah Goen	15	Pengelola wisata kuliner khas
2	Kawung Tilu	8	Pengelola wisata rekreasi RTH
3	Budidaya Ikan	3	Pengelola wisata edukasi
4	Kesenian Budaya Gamelan	3	Pengelola wisata budaya
5	Taman Buah	2	Pengelola area taman buah

No	Unit Atraksi Wisata	Jumlah SDM	Keterangan
Total		**28**	

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Sebagaimana disampaikan oleh A1 (Sekretaris Desa Cipayung): "Proses nya pasti tidak mudah ya...dan pada tahun 2025 itu SK Bupati baru turun tentang desa wisata Kampung Ciranggon" (Wawancara, 18 Februari 2026). Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa legitimasi formal pengelolaan baru terwujud setelah melalui proses panjang dan verifikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

2. Output Pada Peran Pemerintah Desa Cipayung sebagai Fasilitator

A. Attraction

Komponen *output* mencerminkan capaian langsung yang dapat diobservasi dari pelaksanaan program. Kelembagaan pengelola menunjukkan Pokdarwis Bojong Rangkas aktif sebagai pelaksana teknis, namun BUMDes belum difungsikan dan koperasi UMKM belum terbentuk meski diamanatkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 pola dimodifikasi (Galib, 2024). Atraksi wisata berhasil menghadirkan 5 unit yang beroperasi aktif, meliputi: Kawung Tilu, Kuliner Maranggi Mbah Goen, Sanggar Seni Degung Gending Mustika Sari, Wisata Edukasi Budidaya Ikan, dan Taman Buah.

Tabel 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Bulan	Jumlah Kunjungan (Orang)
Januari	350
Februari	420
Maret	510
April	380
Mei	460

Bulan	Jumlah Kunjungan (Orang)
Juni	750
Juli	890
Agustus	670
September	490
Oktober	530
November	480
Desember	820
Total	**6.750**

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

B. Aksesbilitas

Infrastruktur fisik berupa jalan, penerangan jalan, gapura penanda, mural lorong, ornamen bendera, dan fasilitas toilet telah terbangun pola dimodifikasi, karena toilet hanya tersedia di satu titik dan transportasi umum formal belum tersedia. Pembangunan ini berpijak pada amanat Pasal 26 ayat 3 dan 4 Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mewajibkan prioritas APBD untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan.

Gambar 2. Akses Jalan Dan Gapura Desa Wisata



Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Promosi telah berjalan melalui dua pola yang saling melengkapi: Pemerintah Desa Cipayung membangun legitimasi melalui jalur formal (keikutsertaan lomba kampung bersih, portal Jadesta, media berita resmi), sementara Pokdarwis Bojong Rangkas menjangkau wisatawan melalui TikTok dan Instagram pola dimodifikasi, karena strategi promosi terprogram dengan target pasar belum terbentuk.

3. Outcome Pada Peran Pemerintah Desa Cipayung sebagai Dinamisator

A. Dampak Ekonomi

Pengembangan desa wisata membawa pergeseran positif pada struktur ekonomi masyarakat. Sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, mayoritas warga menggantungkan penghasilan pada sektor industri Cikarang sebagai buruh pabrik, dengan aktivitas UMKM yang minim dan tidak terorganisir (Syahputra, 2025). Pasca penetapan status pada 2025, terbuka sumber pendapatan baru melalui ekosistem wisata (Maryani, 2021). Secara kuantitatif, seluruh sektor usaha yang terlibat dalam ekosistem Desa Wisata Kampung Ciranggon mengalami peningkatan pendapatan yang berkisar antara 43% hingga 125% pasca penetapan status desa wisata (Tabel 6).

Tabel 6. Pendapatan Kasar Sektor Ekonomi Sebelum dan Sesudah Desa Wisata

No	Pelaku Usaha	Sebelum (2024)	Sesudah (2025)	Kenaikan (%)
1	Kuliner Maranggi Mbah Goen	Rp 2.000.000/bulan	Rp 4.500.000/bulan	+125%
2	UMKM Sekitar Kampung Ciranggon	Rp 700.000/minggu	Rp 1.000.000/minggu	+43%
3	Pedagang Jajanan Lokal	Rp 400.000/minggu	Rp 650.000/minggu	+62%

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Sebagaimana disampaikan oleh A4 (Pelaku UMKM): "Alhamdulillah, sejak Kampung Ciranggon jadi desa wisata, usaha saya lumayan terasa bedanya. Dulu pembeli kebanyakan warga sekitar sini aja, tapi sekarang pengunjung yang datang wisata juga sering mampir beli. Jadi otomatis penjualan saya ikut naik...secara keseluruhan saya ngerasa lebih untung, rezeki makin rame" (Wawancara, 4 April 2026). Hal ini selaras dengan (Paramitha, 2020) yang menyatakan bahwa sektor wisata memiliki efek turunan nyata terhadap ekonomi lokal mulai dari kuliner, kerajinan, hingga jasa.

B. Dampak Sosial

Sebelum berkembang menjadi desa wisata, Kampung Ciranggon digambarkan sepi, rawan kejahatan (begal dan pencurian), dan minim pengawasan. A5 (Warga) menyampaikan: "Sebelumnya kampung Ciranggon itu lokasinya sangat sepi, masyarakat belum kompak, sering rawan kejahatan...jarang ada yang ngeronda, lalu jalan yang belum bagus" (Wawancara, 7 Maret 2026). Kini, kawasan telah berubah dengan meningkatnya kebersamaan, gotong royong, kesadaran lingkungan, dan terbentuknya identitas sosial baru Kampung Ciranggon (Selviana, 2024). Pemerintah Kabupaten Bekasi bahkan memberikan penghargaan Juara Lomba Kampung Bersih tingkat Kabupaten Bekasi kepada Kampung Ciranggon.

3. Analisis Logic Model Matching

Dari 13 elemen yang dianalisis menggunakan *pola logic model matching* Yin (2014), 5 elemen berstatus Terkonfirmasi dan 8 elemen berstatus Dimodifikasi. Tidak ada satu pun elemen yang ditolak, yang membuktikan rantai kausal *input, output*, dan *outcome* berjalan secara konsisten dan dapat diverifikasi secara empiris.

Tabel 7. Hasil Analisis *Logic Model*

No	Komponen	Elemen	Pola
1	Input	Regulasi	Dimodifikasi
2	Input	Sumber Daya Alam	Terkonfirmasi
3	Input	Sumber Daya Manusia	Dimodifikasi
4	Input	Pokdarwis Bojong Rangkas	Terkonfirmasi
5	Input	Penetapan Status Formal	Terkonfirmasi
6	Output	Kelembagaan Pengelola	Dimodifikasi
7	Output	Atraksi Wisata	Terkonfirmasi
8	Output	Infrastruktur & Fasilitas	Dimodifikasi
9	Output	Promosi & Jaringan	Dimodifikasi

No	Komponen	Elemen	Pola
10	Outcome	Ekonomi Warga & UMKM	Terkonfirmasi
11	Outcome	Kelembagaan Ekonomi (BUMDes)	Dimodifikasi
12	Outcome	Sosial & Partisipasi Warga	Dimodifikasi
13	Outcome	Lingkungan	Terkonfirmasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Status dimodifikasi pada 8 elemen tidak mengindikasikan kegagalan program, melainkan mencerminkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon masih dalam tahap berkembang khususnya pada dimensi kelembagaan ekonomi, kapasitas SDM formal, kelengkapan infrastruktur, dan strategi promosi yang terprogram.

Kesimpulan/ Conclusion

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampung Ciranggon melalui pendekatan *Logic Model* berhasil menunjukkan rantai kausalitas yang konsisten dari segi input, output, hingga outcome, meskipun belum seluruh proposisi terkonfirmasi sepenuhnya (5 elemen terkonfirmasi dan 8 elemen dimodifikasi). Pada komponen input, Pemerintah Desa Cipayung sukses menjadi motivator dengan mengamankan legalitas Kampung Ciranggon sebagai desa wisata pertama di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025, walau aturan teknisnya belum matang. Di sisi output, peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penataan atraksi lokal (*attraction*) dan aksesibilitas (*accessibility*), meski masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas penunjang dan ketiadaan pelatihan formal. Sementara pada komponen outcome, peran dinamisator berhasil memicu dampak sosial-ekonomi yang nyata berupa penurunan kriminalitas serta lonjakan pendapatan UMKM lokal sebesar 43–125%, walaupun kelembagaan ekonomi kolektif seperti BUMDes dan koperasi belum berjalan optimal. Ke depannya, keberlanjutan ekosistem desa wisata ini sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintah desa dalam menerbitkan regulasi operasional yang detail, mengaktifkan BUMDes, serta menyelenggarakan pelatihan SDM yang terstruktur.

B. Saran

Pemerintah Desa Cipayung disarankan untuk segera memperkuat kapasitas tata kelola kelembagaan dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) yang memuat ketentuan teknis operasional dan regulasi pungutan wisata yang jelas, mengaktifkan kembali peran BUMDes secara optimal, serta membentuk koperasi formal untuk mewadahi pelaku UMKM lokal. Selain itu, guna menjaga keberlanjutan ekosistem wisata di tengah kawasan industri, pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan yang terstruktur bagi

pengurus Pokdarwis Bojong Rangkas, melengkapi fasilitas prasarana fisik seperti toilet di berbagai titik atraksi, serta menginisiasi penyediaan transportasi umum formal menuju kawasan wisata demi meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para pengunjung.

Referensi

Azhar, S. N. (2025). *Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove melalui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. *2*(6), 40–52.

Bryman, A., & Bell, E. (2015). *Business Research Methods* (4th ed.). Oxford University Press.

Cindy Aulia Putri, Mahmudah Budiatiningsih, B. N. U. (2025). *PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA AIK BERIK*. *4*(3), 1033–1040.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)* (5th ed.). SAGE Publications.

D. Puziah. (2021). Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Wisata Kawung Tilu Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2553

Dewi, D. K., Hanafiah, A., & Mal, S. (2021). *MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BATU (Studi kasus pada Wisata Lumbung Stroberi Desa Pandanrejo)*. *3*(1), 1–13.

Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar*. *9*(3), 220–227.

Maryani, P. D., Zaenuri, M., & Si, M. (2021). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Tahun 2017-2018*. *5*(2), 115–127.

Muafi, K., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2020). *MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA KAMPUNG MAJAPAHIT (Studi Kasus Desa Bejijong , Kecamatan Trowulan , Kabupaten Mojokerto)*. *14*(3), 78–87.

Mulyani, S., Dewi, R., Ahsani, P., & Wijaya, D. N. (2021). *Collaborative Governance on Ecotourism : Towards Sustainable Tourism Development*. *17*(148), 319–334. https://doi.org/10.24258/jba.jba.v17i3.958

Pandu Logika, Sugeng Suharto, J. Y. (2022). *Implementasi Rencana Pengembangan Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari Di Kabupaten Rejang Lebong*. *19*(2), 130–140.

Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyana, N. (2020). *S TRATEGI K ELOMPOK S ADAR W ISATA (P OKDARWIS) DALAM P ENGEMBANGAN P ARIWISATA B ERBASIS P EMBERDAYAAN M ASYARAKAT DI*. *2*.

Parta, A., Lumbantoruan, T., & Ginting, W. O. (2025). *Studi Peran Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Illegal Fishing : PSDKP sebagai Instrumen Pengawasan di Perairan Kota Sibolga*. *10*(4), 725–740.

Pitana, I.G.M., Gayatri, P. (2005). *Sosiologi Pariwisata (dikutip dalam Novitri Daeng)* (p. 95).

Putri, S. S., Nisa, N. K., & Sa, B. (2025). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Budaya Di Desa Wisata Bumi Tirtayasa*. 9740–9752.

Puziah, D. S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). *Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Wisata Kawung Tilu Kabupaten Bekasi) Saat ini dunia sedang digemparkan dengan adanya penyebaran Virus Coronavirus disease 2019 (covid-19)*

merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan . *5*(4), 1282–1290. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2553/http

Qottrunnada, I. I., & Prathama, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Pariwisata pada Objek Wisata Goa Akbar di Tuban : Sebuah Studi Pengembangan*. *13*(3), 402–414.

Raditya, D. F., Ayu, D., Lily, M., & Subrata, I. M. (2024). *Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Wisata Kenderan*. *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.52352/jastd.v2i1.1450

Rais, M., Qusyairi, A., Hendratono, T., & Sarwono, A. W. (2023). *Penerapan Konsep Pariwisata Hijau di Gunung Dempo Kota Pagar Alam Sumatera Selatan*. *2*(4), 385–395.

Riadhussyah, M., Syafii, S., & Nawir, A. A. (2021). *Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Saleh, F., Kadir, B., Latif, A. N. K., & Fajar Sidiq Limola. (2025). *Pemberdayaan pokdarwis sebagai penggerak dan pengembangan pariwisata di desa bulu cindea bungoro kabupaten pangkajene dan kepulauan*. 98–106.

Selviana Burhanuddin Rahim, S. (2024). *Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di kabupaten jeneponto*. *5*(April).

Somad, D., & Rahmanita, M. (2025). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Aneuk Laot Aceh (Community-based Tourism Development in Aneuk Laot Village Aceh)*. *x*(x).

Syahputra, M., & Fikri, A. N. (2025). *Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Resun*. *4*(1), 31–40.

Xu, L., Ao, C., Liu, B., & Cai, Z. (2023). Ecotourism and sustainable development : a scientometric review of global research trends. *Environment, Development and Sustainability*, *25*(4), 2977–3003. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02190-0

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Yulianti, D., & Junaidi, H. (2021). *Evaluasi Manajemen Tata Ruang Wisata Dan Ruang Terbuka untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Dan Pad Kota Palembang*. *10*(2), 41–46.